Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Made Putri Ardia Garini[1]
Ni Made Adi Erawati[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia
**Correspondences* : ardiagarini3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada 25 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Adapun metode penentuan sampel yang digunakan yakni *purposive sampling*, sehingga diperoleh 75 orang sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun analisis regresi linear berganda dipilih peneliti sebagai teknik dalam melakukan analisis dan menguji hipotesis. Hasil penelitian ini yakni kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sistem Pengendalian Intern; Komitmen Organisasi; Teknologi Informasi; Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Quality of Local Government Financial Reports

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that affect the quality of the financial statements of the Bangli Regency Government. Data was collected by distributing questionnaires to 25 OPD within the Bangli Regency Government. The method of determining the sample used is purposive sampling, with 75 people selected as samples in this study. In addition, the researchers chose multiple linear regression analysis for analyzing and testing hypotheses. The analysis findings in this research found that human resource competence, government internal control system, organizational commitment, utilization of information technology, and the application of accrual-based government accounting standards positively affect the quality of the Bangli Regency Government's financial reports.

Keywords: *Human Resources Competency; Internal Control System; Organizational Commitment; Information Technology; Accrual Based Government Accounting Standards.*

e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 11
Denpasar, 26 November 2022
Hal. 3255-3271

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i11.p05

PENGUTIPAN:
Garini, M. P. A., & Erawati, N. M. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3255-3271

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
28 April 2022
Artikel Diterima:
11 Juni 2022

Artikel dapat diakses : https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index

PENDAHULUAN

Reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, ditandai dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi, kepada entitas penyelenggara pemerintahan termasuk di lingkungan pemerintah daerah. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi tersebut, dapat terpenuhi salah satunya melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wadah bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan informasi keuangan yang berkualitas dalam LKPD akan memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat dan selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, sebab tingkat kualitas informasi yang terkandung akan mempengaruhi kekuatan keputusan yang diambil (Afiah *et al*., 2020). Berdasarkan hal tersebut kualitas informasi dari laporan keuangan yang disajikan, merupakan hal mendasar yang sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Namun, tatkala laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas atau bermutu menjadi harapan bagi berbagai pihak yang bersangkutan, harapan tersebut pun tidak selalu dapat terpenuhi, oleh sebab adanya permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Mengacu pada hal tersebut, fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk digali lebih dalam.

Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang menjadi ketentuan normatif yang harus terpenuhi, agar laporan keuangan pemerintah dapat mewujudkan kualitas yang diharapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain dilihat dari keempat karakteristik tersebut, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah kerap menjadikan argumentasi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai parameter yang digunakan untuk mendapatkan tingkat keyakinan atas sebuah laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan hasil tinjauan BPK atas LKPD di wilayah Provinsi Bali, LKPD Kabupaten Bangli menjadi LKPD terakhir di Provinsi Bali yang akhirnya mendapat *unqualified opinion* atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, setelah sebelumnya menjadi satu-satunya LKPD di Provinsi Bali yang memperoleh *qualified opinion* atau opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tepatnya pada LKPD tahun 2015. Di balik *unqualified opinion* atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan pada LKPD tahun 2019 pun, masih diperoleh catatan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan akan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK juga melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan, perihal kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli tahun 2020, yang ternyata berdasarkan keterangan Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Bangli, didapatkan beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan, di antaranya yakni pemungutan pajak daerah, perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli, serta penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian hibah kepada organisasi masyarakat belum sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan dana transfer bantuan keuangan kepada

pemerintah desa pun belum sepenuhnya memadai. Selain itu, pada beberapa perangkat daerah penganggaran untuk pembayaran honorarium non ASN belum sesuai dengan pedoman penyusunan APBD. Tidak hanya itu BPK juga menemukan realisasi belanja yang tidak menggambarkan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang seharusnya, selain itu terdapat juga anggaran dan realisasi uang transportasi suatu kegiatan yang tidak mengacu pada satuan biaya perjalanan dinas, serta terdapat satu belanja yang belum ditetapkan Standar Satuan Biayanya (SBB). Sedangkan untuk pengelolaan aset, belum dilakukan penghapusan atas aset yang terdampak keadaan kahar (terbakar dan hilang).

Laporan keuangan yang berkualitas meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, tercipta dengan adanya dukungan dari faktor-faktor di lingkungan sekitar baik dari aparat yang terlibat di dalam penyajian laporan keuangan, maupun kebijakan atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Agung & Gayatri (2018), beberapa faktor yang dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas ialah sumber daya manusia yang berkompeten dalam penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern yang memadai, dan komitmen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor tersebut pun perlu mendapat perhatian khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli demi menciptakan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya tidak terlepas dari adanya peran besar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kompetensi ialah karakter fundamental individu yang berhubungan dengan efektivitas pencapaian kesuksesan kerja, yang dapat direpresentasikan dalam wujud tindakan, perilaku, serta pikiran dalam suatu pekerjaan atau situasi (Afiah *et al*., 2020; Sari *&* Ariawaty, 2019). Menurut Muda *et al*. (2017) kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan berbekal pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang cukup memadai. Sehubungan dengan pengertian tersebut, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya di bidang akuntansi, sangat diperlukan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Fitriana & Wahyudin, 2017). Penelitian mengenai keterkaitan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sudah beberapa kali dilaksanakan dan memperoleh hasil yang beragam. Beberapa di antaranya yakni Sumaryati *et al*. (2020) dan Ariyanto (2020) yang memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Wijayanti & Handayani (2017) menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Seberapa baik pengendalian intern yang diterapkan oleh pemerintah juga dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai akan menjadikan sumber daya, segala aktivitas atau kegiatan termasuk pengolahan data termonitor serta berada dalam lingkup pengaturan, sehingga dapat mencegah dan mendeteksi kekeliruan atau tindak penyelewengan yang dilakukan, termasuk dalam pelaporan keuangan (Setiawan & Gayatri, 2017). Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem

pengendalian intern melakoni peran penting dalam memastikan kredibilitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan (Le & Tran, 2018). Penelitian mengenai keterkaitan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pun, telah beberapa kali dilakukan di antaranya oleh Lelly & Afiah (2017); Mardani & Suhartono (2019) yang memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif atau searah antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan bertolak belakang diperoleh oleh Mokoginta *et al*. (2017) yang menyatakan adanya hubungan negatif atau tidak searah antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Komitmen organisasi juga menjadi salah satu faktor yang mungkin berperan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih bermutu. Komitmen organisasi terbentuk berlandaskan pada kepercayaan pekerja akan norma-norma organisasi, keikhlasan pekerja berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, serta loyalitas untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Mutiana *et al*., 2017). Adanya loyalitas yang tinggi, akan menjadikan anggota organisasi berusaha memberikan kinerja terbaiknya, demi kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan, termasuk di dalam penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas atau bermutu. Penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan oleh sejumlah peneliti dengan hasil yang beragam, di antaranya oleh Widari & Sutrisno (2017); Agung dan Gayatri (2018) menemukan komitmen organisasi memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Astika & Yasa (2018) serta Hernanda & Setiyawati (2020) menyatakan komitmen organisasi tidak memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Modernisasi dan perubahan peraturan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, yang awalnya dikemas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kemudian digantikan ke dalam peraturan baru, tepatnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyebabkan munculnya faktor lain yang kiranya dapat memberi pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor tersebut yakni pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah akan sangat membantu mempersingkat tahap pengelolaan data transaksi keuangan, dapat menekan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, serta membantu pendistribusian informasi keuangan ke layanan publik (Adnin & Atiningsih, 2020). Beberapa penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara penggunaan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, memperoleh hasil yang kurang konsisten seperti penelitian oleh Julita dan Susilatri (2018) yang memperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Tampubolon & Basid (2019) yang menyatakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh akibat pemanfaatan teknologi informasi.

Transformasi dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi basis akrual penuh (*full accrual*) dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah, telah

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Undang-Undang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mendefinisikan basis akrual sebagai basis akuntansi yang menyetujui dampak transaksi dan peristiwa lainnya tatkala hal tersebut berlangsung, tanpa mengindahkan saat kas atau setara kas diperoleh. Basis akrual untuk neraca memaknai aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat tatkala transaksi berlangsung, terlepas dari kapan kas atau setara kas diperoleh atau dibayar (Yahya *et al*., 2018). Sehubungan dengan pengertian tersebut, akuntansi berbasis akrual ini mampu menghasilkan kalkulasi biaya publik yang lebih wajar dan komprehensif, yang juga diharapkan dapat meningkatkan mutu informasi dari laporan keuangan yang disajikan. Harapannya informasi nantinya akan lebih efektif digunakan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah (Gigli *and* Mariani, 2018; Holle *et al*., 2019). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh implementasi atau penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, mengemukakan hasil yang tidak sejalan. Setiawan dan Gayatri (2017) menyatakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Kaifah dan Tryana (2020) menyatakan implementasi atau penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu, dan adanya maksud untuk mengkaji faktor-faktor yang memberi pengaruh pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, membuat peneliti tertarik untuk menyelidiki pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kualitas atau mutu dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini pemilihan lokasi penelitian berbasis pada kekurangan yang ada dalam penyajian laporan keuangan, sehingga peneliti berfokus pada lokasi yang memiliki kekurangan tersebut, agar dapat memberikan solusi yang tepat sasaran untuk memecahkan kekurangan yang ada. Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terkait dengan jumlah variabel independen atau variabel bebas yang ditetapkan. Penelitian ini mempergunakan lima variabel independen. Penelitian terdahulu belum pernah menggunakan kombinasi dari kelima variabel independen ini dalam penelitiannya. Selain itu, agar lebih mengerucut pada sistem pengendalian intern yang diberlakukan dalam lingkup pemerintahan, dan demi memperoleh hasil penelitian yang lebih spesifik, maka variabel sistem pengendalian intern yang ditetapkan dalam penelitian ini ialah sistem pengendalian intern pemerintah.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dipandang relevan untuk menjelaskan topik pada penelitian ini. Jensen dan Meckling merupakan tokoh yang pertama kali mencetuskan Teori Keagenan tepatnya pada tahun 1976. Teori Keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bahwasanya pemerintah daerah (eksekutif) sebagai *agent* yang mendapatkan amanah dalam menjalankan pemerintahan, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada rakyat yang dalam hal

ini mengutus legislatif sebagai wakilnya yang bertindak selaku *principal* dan bertanggung jawab mengontrol jalannya pemerintahan. Pertanggungjawaban *agent* kepada *principal* tersebut dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Teori Kepatuhan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini, dilihat dari perspektif normatif dapat menjelaskan masalah pelaporan keuangan (Eristanti *et al*., 2019). Teori yang dicetuskan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 ini, dapat menggambarkan bagaimana kepatuhan pemerintah daerah akan peraturan yang ditetapkan dalam hal penyajian laporan keuangan, guna mempertanggungjawabkan jalannya tugas dan fungsinya kepada pemangku kepentingan, sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Teori Keagenan dapat menjelaskan keterkaitan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu dengan kualitas atau mutu dari laporan keuangan pemerintah daerah. *Agent* yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh *principal*. Lembaga legislatif yang merupakan representasi dari rakyat yang dalam hal ini bertindak selaku *principal*, membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas atau bermutu sebagai wujud pertanggungjawaban *agent*. Pemenuhan kebutuhan *principal* akan laporan keuangan yang bermutu, dapat terealisasi melalui kompetensi yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan tersebut (Karsana & Suaryana, 2017). Sumber daya manusia yang berkompeten khususnya di bidang akuntansi dapat dikatakan menjadi salah satu aspek penting yang dapat memberi pengaruh terhadap baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh *agent* untuk *principal*-nya (Nurlis, 2018). Penelitian sejenis yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Pujanira & Taman (2017); Agung & Gayatri (2018); Tampubolon & Basid (2019); Ariyanto (2020); serta Sumaryati *et al*. (2020) memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Keterkaitan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas atau mutu laporan keuangan pemerintah daerah pun, dapat dijelaskan dalam konteks Teori Keagenan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan institusi pemerintah dapat menjadi salah satu tindakan untuk mengatasi adanya *agency problem*, karena dengan pengendalian intern yang memadai, risiko terjadinya kekeliruan maupun kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan akan terminimalisir, oleh karenanya akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas, sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat yang dalam hal ini direpresentasikan oleh lembaga legislatif selaku *principal*. Apabila dikaitkan dengan Teori Kepatuhan, pengendalian intern yang dijalankan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk kepatuhannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang secara tegas telah menuntut institusi pemerintah untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang juga berguna untuk memberikan kepastian memadai, bahwasanya laporan keuangan pemerintah daerah telah tersaji secara wajar, sebagaimana SAP

dan kepatuhan akan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Putra (2017); Julita dan Susilatri (2018); Mene *et al*. (2018); serta Swastika dan Widhiyani (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_2 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Keterkaitan antara komitmen organisasi dengan mutu dari laporan keuangan pemerintah daerah, dapat dihubungkan dengan Teori Keagenan. Anggota organisasi yang memiliki loyalitas tinggi, akan menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari pemerintahan, oleh sebab itu anggota organisasi akan cenderung memberikan kinerja terbaiknya, termasuk di dalam memenuhi kebutuhan *principal* akan informasi keuangan yang berkualitas, sehingga instansi pemerintah tempatnya mengabdi memiliki citra baik di mata *principal*-nya. Teori Kepatuhan pun menunjang adanya keterkaitan antara komitmen organisasi dengan mutu dari laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut karena setiap individu yang terlibat dalam suatu organisasi, sudah semestinya mempunyai komitmen dalam mematuhi segala peraturan, terlebih peraturan yang sudah disepakati bersama di lingkungan internal organisasi, demi tercapainya tujuan organisasi termasuk dalam menyajikan laporan keuangan yang bermutu atau berkualitas (Shintia & Erawati, 2017). Penelitian yang dilaksanakan sebelumnya oleh Widar & Sutrisno (2017); Endianto *et al*. (2017); memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas atau mutu dari laporan keuangan pemerintah daerah, begitu pula hasil penelitian Eristanti *et al*. (2019) yang menyatakan bahwasanya komitmen organisasi memberikan pengaruh pada ketepatanwaktu pelaporan keuangan.

H_3 : Komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi apabila dikaitkan dengan Teori Keagenan akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan *principal* akan laporan keuangan yang berkualitas. Teori Kepatuhan pun menunjang adanya kaitan antara pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dengan kualitas atau mutu dari laporan keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, guna memaksimalkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam penggunaan teknologi informasi tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, sudah seharusnya taat atau patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi informasi yang mungkin akan berdampak negatif bagi kualitas atau mutu dari laporan keuangan yang disajikan. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Mene *et al.* (2018); Agung & Gayatri (2018); serta Julita & Susilatri (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Berdasarkan Teori Keagenan, salah satu penyebab adanya *agency problem* adalah *agent* yang dalam hal ini ialah pemerintah daerah, memiliki lebih banyak akses atas informasi keuangan yang bahkan tidak dimiliki oleh *principal*, yang kerap disebut sebagai asimetri informasi. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengantisipasi terjadinya asimetri informasi tersebut. Teori Kepatuhan pun menunjang adanya keterkaitan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan kualitas atau mutu dari laporan keuangan pemerintah daerah. Terbukti pada tahun anggaran 2015 seluruh pemerintah daerah secara serentak sudah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual, yang merupakan wujud kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan, akuntansi berbasis akrual menciptakan laporan keuangan yang dapat diyakini, cermat, komprehensif dan relevan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Setiawan & Gayatri, 2017). Laporan keuangan yang dihasilkan pun akan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang semakin kompleks (Eulner *&* Waldbauer, 2018). Hasil penelitian yang dilakuan oleh Setiawan & Gayatri (2017); Wijayanti & Hendayani (2017); serta Holle *et al*. (2019) menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual memberi pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

H_5 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh aparat yang menjalankan tugas di bidang akuntansi atau tata usaha keuangan pada 25 OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sampel ditentukan dengan kriteria aparat yang menjalankan tugas di bidang akuntansi atau tata usaha keuangan di setiap OPD yang meliputi: kepala subbagian keuangan; bendahara; serta satu orang bendahara pembantu dengan kurun waktu kerja sekurang-kurangnya satu tahun dalam masa penyusunan laporan keuangan. Mengacu pada kriteria tersebut dari total jumlah populasi yakni 151 orang, diperoleh 75 orang yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan metode angket yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Setiap jawaban dari butir pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala *likert* 4 (empat) poin.

Pada penelitian ini variabel independen atau variabel bebas terdiri dari kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian intern pemerintah (X_2), komitmen organisasi (X_3), pemanfaatan teknologi informasi (X_4), dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_5). Sementara kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli (Y) sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Pengukuran variabel kompetensi sumber daya manusia mempergunakan indikator yang mengacu pada penelitian Sudiarianti (2015), yang meliputi: pengetahuan; keahlian; serta perilaku. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sistem pengendalian intern pemerintah

mengacu pada penelitian Andrianto (2017). Indikator yang dimaksud antara lain : lingkungan pengendalian; evaluasi risiko; aktivitas pengendalian; informasi dan komunikasi; serta pengawasan. Variabel komitmen organisasi diukur dengan mengacu pada indikator Allen dan Meyer (1990) yang dikembangkan oleh Andika (2017). Indikator yang dimaksud di antaranya : komitmen afektif; komitmen berkelanjutan; serta komitmen normatif. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan indikator penelitian Ningrum (2018), yakni: pemanfaatan komputer dan jaringan internet. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mengacu pada indikator penelitian Pratiwi (2018). Indikator yang dimaksud antara lain: pengakuan pendapatan; pengakuan beban; pengakuan aset; pengakuan kewajiban atau utang; serta pengakuan ekuitas. Sementara variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Sudiarianti (2015), indikator tersebut antara lain: relevan; andal; dapat dibandingkan; serta dapat dipahami.

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun program yang digunakan untuk membantu proses analisis data ialah program SPSS 25 *for windows*. Model persamaan regresi yang digunakan dapat disajikan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon \quad \text{.....(1)}$$

Keterangan:
Y = Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli
α = Konstanta
β_1 = Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia
β_2 = Koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah
β_3 = Koefisien regresi komitmen organisasi
β_4 = Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi
β_5 = Koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
X_1 = Kompetensi sumber daya manusia
X_2 = Sistem pengendalian intern pemerintah
X_3 = Komitmen organisasi
X_4 = Pemanfaatan teknologi informasi
X_5 = Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
ε = Standar *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif dimaksudkan guna memberikan deskripsi atau gambaran terkait suatu data yang dapat diamati dari nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai tertinggi atau terendah (Ghozali, 2018:19).

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	75	25	40	33,81	3,664
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2)	75	25	40	34,33	4,121
Komitmen Organisasi (X_3)	75	20	32	27,05	3,288
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4)	75	19	28	24,33	2,947
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X_5)	75	15	20	17,11	2,317
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	75	28	40	34,49	4,147

Sumber: Data Penelitian, 2022

Mengacu pada hasil uji statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah data (N) dalam penelitian ini sebanyak 75 data, yang didapatkan dari penyebaran kuesioner penelitian. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) memiliki nilai terendah yakni 25, nilai tertinggi yakni 40, nilai *mean* (rata-rata) yakni 33,81, serta standar deviasi senilai 3,664. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) mempunyai nilai terendah yakni 25, nilai tertinggi yakni 40, nilai *mean* (rata-rata) yakni 34,33, dan standar deviasi senilai 4,121. Variabel komitmen organisasi (X_3) memiliki nilai terendah yakni 20, nilai tertinggi yakni 32, nilai *mean* (rata-rata) yakni 27,05, serta standar deviasi senilai 3,288. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_4) mempunyai nilai terendah yakni 19, nilai tertinggi yakni 28, nilai *mean* (rata-rata) yakni 24,33 dan standar deviasi senilai 2,947. Nilai terendah variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yakni 15, nilai tertinggi yakni 20, nilai *mean* (rata-rata) yakni 17,11 serta standar deviasi senilai 2,317. Nilai terendah variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yakni 28, nilai tertinggi yakni 40, nilai *mean* (rata-rata) yakni 34,49, serta standar deviasi senilai 4,147.

Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model regresi melewati uji asumsi klasik. Model regresi yang lolos uji asumsi klasik adalah model regresi yang berdistribusi normal dan terlepas atau terbebas dari keadaan multikolinearitas serta heteroskedastisitas, sehingga dapat dinyatakan model regresi layak untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Rangkuman hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat diamati pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	*Unstandardized Coefficients*		t	*Sig.*
	B	*Std. Error*		
(*Constant*)	-2,579	1,919	-1,344	0,183
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	0,171	0,069	2,473	0,016
Sistem Pengendalian Intern (X_2)	0,299	0,085	3,497	0,001
Komitmen Organisasi (X_3)	0,175	0,080	2,199	0,031
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4)	0,308	0,111	2,774	0,007
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X_5)	0,515	0,127	4,066	0,000
Adjusted R Square	: 0,859			
F hitung	: 91,247			
Sig. F	: 0,000			
Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Mengacu pada Tabel 2, dapat dirumuskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -2,579 + 0,171X_1 + 0,299X_2 + 0,175X_3 + 0,308X_4 + 0,515X_5 + \varepsilon$$

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni sebesar 0,859 atau 85,9 persen. Hal tersebut bermakna 85,9 persen variasi variabel dependen atau variabel terikat yakni kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dipengaruhi oleh variasi variabel independen yakni kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selebihnya yakni senilai 14,1 persen dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Temuan uji kelayakan model (uji F) juga disajikan pada Tabel 2. Hasil uji memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut memberi makna bahwa model layak dijadikan sebagai alat analisis untuk menyelidiki keterkaitan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau dapat juga berarti secara simultan (bersama-sama) variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis (uji t) yang telah tersaji pada Tabel 2, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016, lebih kecil dari taraf signifikasi sebesar 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,171. Hal tersebut bermakna bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, sehingga H_1 diterima. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dalam Teori Keagenan. Keterlibatan sumber daya manusia yang berkompeten khususnya di bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, dapat membantu *agent* memenuhi kebutuhan *principal* akan informasi keuangan yang berkualitas dan berguna dalam penentuan keputusan. Adapun *principal* yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga legislatif yang merupakan

representasi keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Dapat dinyatakan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu baik buruknya kualitas atau mutu dari laporan keuangan pemerintah daerah yang tersaji. Temuan penelitian ini mendukung beberapa hasil penelitian sejenis oleh Pujanira dan Taman (2017); Agung dan Gayatri (2018); Tampubolon dan Basid (2019); serta Ariyanto (2020); yang menemukan bahwasanya kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil apabila dibandingkan dengan taraf signifikasi sebesar 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yakni 0,299. Hal tersebut bermakna bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, sehingga H_2 diterima. Teori Keagenan dapat menjelaskan keterkaitan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli sebagai *agent*, berkewajiban memenuhi kebutuhan *principal* terkait informasi keuangan yang berkualitas sebagai salah satu wujud akuntabilitas *agent*. Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai menjadi penunjang terciptanya laporan keuangan yang berkualitas tersebut. Pelaksanaan pengendalian intern yang memadai dalam sistem akuntansi, akan menciptakan informasi keuangan yang lebih berkualitas atau bermutu sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada *principal*-nya. Hal tersebut nantinya juga dapat meminimalisir terjadinya *agency problem*. Keterkaitan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, juga sesuai dengan Teori Kepatuhan. Pengendalian intern yang dijalankan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bangli merupakan bentuk kepatuhannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dengan kepatuhan dalam menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, dapat memberikan kepercayaan yang memadai bahwasanya laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dengan wajar, sesuai dengan SAP dan ketaatan akan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya laporan keuangan yang tersaji dapat dikatakan berkualitas atau bermutu. Temuan mendukung hasil penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Putra (2017); Julita dan Susilatri (2018); Mene *et al*. (2018); serta Swastika dan Widhiyani (2020) yang menyatakan bahwasanya sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,031, lebih kecil apabila dibandingkan dengan taraf signifikasi sebesar 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yakni 0,175. Hal tersebut bermakna bahwa komitmen organisasi memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, sehingga H_3 diterima. Apabila dikaitkan dengan Teori Keagenan, tingginya komitmen organisasi dari *agent*, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, akan menjadikannya mempunyai kesadaran untuk mempertanggujawabkan kepercayaan yang

diberikan oleh *principal,* dengan mengungkapkan semua aktivitas dan informasi keuangan yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan sebab rasa memiliki yang ada membuat aparat tersebut ingin instansinya mendapat citra baik di mata publik khususnya *principal*. Teori Kepatuhan juga mendukung pengaruh positif komitmen organisasi pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Adanya komitmen dalam diri aparat untuk mematuhi aturan-aturan guna mewujudkan tujuan organisasi, termasuk aturan dalam penyajian laporan keuangan yang sudah disepakati bersama, akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas dan tentunya memberikan manfaat bagi para penggunanya. Temuan mendukung hasil penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Shintia dan Erawati (2017); Endianto *et al*. (2017); serta Agung dan Gayatri (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,007, lebih kecil dari taraf signifikasi sebesar 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,308. Hal tersebut bermakna bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, maka dari itu H_4 diterima. Berdasarkan Teori Keagenan, *agent* yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, guna memenuhi tuntutan *principal* akan informasi keuangan yang berkualitas meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sehingga tidak menyesatkan para penggunanya di dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Teori Kepatuhan pun mendukung keterkaitan atau hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, guna mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan mendistribusikan informasi keuangan daerah. Pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi tersebut, harus diimbangin dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan teknologi informasi yang justru dapat mengurangi nilai dari informasi keuangan yang tersaji. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyajian laporan keuangan yang diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan-aturannya, niscaya akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih maksimal kualitasnya. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Mene *et al*. (2018); Agung dan Gayatri (2018); serta Julita dan Susilatri (2018) yang juga memperoleh arah hubungan yang positif terkait dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari taraf signifikasi sebesar 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,515. Hal tersebut bermakna

bahwasanya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, sehingga H_5 diterima. Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan Teori Keagenan. Akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif yang akan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli selaku *agent* dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitasnya kepada rakyat yang dalam hal ini direpresentasikan oleh lembaga legislatif selaku *principal*. Oleh sebab informasi keuangan yang disajikan telah komprehensif, sesuai dengan kebutuhan *principal*, maka asimetri informasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan *principal*-nya pun dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Kepatuhan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan yang ada khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan mematuhi paraturan yang ada, akan tersaji laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah berkekuatan hukum. Kredibilitas laporan keuangan yang sudah mengacu pada standar pun tidak akan diragukan lagi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Setiawan dan Gayatri (2017); Wijayanti dan Hendayani (2017); serta Holle *et al*. (2019) yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel terbatas pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, sehingga hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi. Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas lokasi penelitian meliputi OPD di beberapa kabupaten sehingga diharapkan hasil penelitian mempunyai kemampuan generalisasi yang lebih luas.

REFERENSI

Adnin, A. E. K., & Atiningsih, S. (2020). The Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control Systems and Information Technology Utilization on the Quality of Local Government Financial Statements With Organizational Commitments As Moderation Variables. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, *4*(02), 216–229. https://doi.org/10.35310/accruals.v4i02.584

Afiah, N. N., Alfian, A., & Sofia, P. (2020). Effect of employee competence and internal control systems on accounting information quality of the local government in West Java region. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, *25*(Extra1), 146–154. https://doi.org/10.5281/zenodo.3774595

Agung, T. M., & . G. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, *23*, 1253. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p17

Allen, N. J., and Meyer J. P. 1990. The Measurement and Antecendents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1-18.

Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, *6*(1), 41–54.

Astika, I. B. P., & Yasa, G. W. (2018). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, *22*(1), 301–325. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p12

Endianto, M., Herawati, N. T., & Kurniawan, P. S. (2017). Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah , Peran Internal Audit Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bangli). *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*, *1*, 2.

Eristanti, B.D.A., Hermanto, & Putra, I.N.N.A. (2019). Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 622–650. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p23

Eulner, V., & Waldbauer, G. (2018). New development: Cash versus accrual accounting for the public sector—EPSAS. *Public Money and Management*, *0962*, 1–4. https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1444560

Fitriana & Wahyudin, A. (2017). Factors Influencing The Quality of Financial Reporting on Local Government of Purbalingga. *Accounting Analysis Journal*, 6(1), 27–38.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Edisi 9). Semarang: Universitas Diponegoro.

Gigli, S., & Mariani, L. (2018). Lost in the transition from cash to accrual accounting: Assessing the knowledge gaps in Italian public universities. *International Journal of Public Sector Management*, *31*(7), 811–826. https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2017-0184

Holle, V. A., Salle, A., & Sanggenafa, M. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Sistem pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, *14*(1), 16–35.

Julita, & Susilatri. (2018). Analysis of factor affecting the quality of government financial report Bengkalis regency. *International Journal of Scientific and Technology Research*, *7*(2), 157–164.

Kaifah, U. A. L. T. (1967). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, *2*(2), 26–37.

Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. N. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), hal. 643–670.

Le, T. T. H., & Tran, M. D. (2018). The effect of internal control on asset

misappropriation: The case of Vietnam. *Business and Economic Horizons*, *14*(4), 941–953. https://doi.org/10.15208/beh.2018.64

Lelly, K. C., & Afiah, N. N. (2017). Does quality of financial statement affected by internal control system and internal audit? *International Journal of Economics and Financial Issues*, *7*(2), 568–573. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/365935%0Ahttp:www.econjournals.com

Mardani, L. B., & Suhartono, E. (2019). Analisis Pengaruh Sistem Informasi Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pemerintahan Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, *10*(2), 177–188.

Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Penelitian Akuntansi*, *13*(04), 133–143. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018

Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern : Jurnal Penelitian Akuntansi*, *12*(2), 874–890. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18282.2017

Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). The influence of human resources competency and the use of information technology on the quality of local government financial report with regional accounting system as an intervening. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, *95*(20), 5552–5561.

Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *3*(2), 151–167. https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8228

Nurlis. (2018). The effect of the government accounting standards implementation and apparatus competency on the quality of the local government financial reporting:Case study at Klaten district government. *Research Journal of Finance and Accounting*, *9*(8), 63–69. www.iiste.org

Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Penelitian Akuntansi Dan Manajemen*, *6*(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643

Putra, W. E. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Penelitian Akuntansi Terpadu*, *10*(2), 282–293. https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4259

Sari, N. Z. M., & Rina Novianty Ariawaty, R. (2019). Management information system influenced by competence of human resources employee of civil apparatus (Asn) West Java. *International Journal of Scientific and Technology*

Research, *8*(10), 1019–1021.

Setiawan, I. W. N. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, *21*(1), 671–700.

Shintia, C. I. A. P., & Erawati, N. M. A. (2017). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Sistem Informasi, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1186–1205. https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p12

Sumaryati, A., Novitasari, E. P., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(10), 795–802. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795

Sutaryo, Naviantia, I. A., & Muhtar. (2020). Audit opinion on government financial report: Evidence from local governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129–144.

Swastika, I. B. P. J., & Sari Widhiyani, N. L. (2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(11), 2724. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p02

Tampubolon, F. M., & Basid, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *3*(1), 55–65. https://doi.org/10.23969/oikos.v3i1.1415

Widari, L., & Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, *5*(10), 117–126.

Wijayanti, R. (2017). Pengaruh kompetensi SDM dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Penelitian Akuntansi Volume 6,Nomor 3,Maret 2017*, *6*, 18.

Yahya, I., Hasibuan, R. P. S., Torong, Z. B., & Muda, I. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (SAP) based on acrual in the government of the districts/cities in North Sumatera Province. *Journal of Management Information and Decision Science*, *21*(1), 1–14.